



Judul : Gedung baru DPR telan Rp 5,7 T
Tanggal : Jumat, 27 Oktober 2017
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 3

Gedung Baru DPR Telan Rp 5,7 T

Rp 601 Miliar untuk Konsultan Perencanaan

JAKARTA—Upaya Wakil Rakyat di Senayan untuk merealisasikan pembangunan gedung baru DPR RI tak pernah surut. Dana pembangunan gedung baru di kawasan Komplek Parlemen, Senayan masuk dalam pagu anggaran DPR di APBN 2018 dengan total Rp 5,7 triliun. Sedangkan Rp 601 miliar hanya untuk konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi. "Anggaran Rp 601 miliar yang masuk dalam APBN 2018 bukan untuk pembangunan fisik gedung baru DPR. Rinciannya, untuk pembangunan gedung baru dialokasikan sebesar Rp 320,44 miliar dan alun-alun demokrasi Rp 280 miliar," ujar Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR RI kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (26/10).

Menurutnya, konsultan perencanaan akan menentukan desain dan nominal maksimal dari proyek penataan kawasan secara keseluruhan. "Sekarang ini keluar anggaran Rp 601 miliar ini untuk konsultan perencanaan. Tidak hanya perencanaan daripada gedung, tapi meliputi seluruh perencanaan dari kawasan parlemen, alun-alun demokrasi, gedung-gedung DPD, gedung DPR dan sebagainya," beber politisi Partai Demokrat itu.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu mengklaim, anggaran proyek penataan kawasan itu masuk dalam nomenklatur Kesetjeraan DPR. Tahap konsultasi perencanaan kemungkinan akan dilakukan tahun depan sesuai dengan pelaksanaan APBN 2018. "Yang jelas, dulu kan ini sudah pernah dibicarakan. Dulu tidak mendapat persetujuan, baru kemarin itu kembali diajukan oleh Kementerian Keuangan dan itu sudah tertera di APBN yang kemarin diketok di tahun 2018," katanya.

Agus menambahkan, seluruh pelaksanaan proyek penataan parlemen,

akan diserahkan kepada pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara, lanjutnya, urusan administrasi seperti surat menyurat hingga dokumen, pihaknya menyerahkan kepada Kesetjeraan DPR. "Untuk pelaksanaannya memang seluruhnya diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan apabila yang melakukan bisa saja BUMN," kata Agus.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI, Damayanti membenarkan anggaran Rp 601 miliar itu hanya untuk tahap konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi proyek penataan kawasan parlemen. "Ini tidak serta merata langsung bangun gedung, harus ada perencananya, konsultan perencana, konsultasi manajemen konstruksi dulu baru dibangun," katanya.

Tapi, dia mengklaim alokasi anggaran Rp 601 miliar masih berupa pagu tertinggi. Sehingga ada kemungkinan tidak akan habis digunakan. "Jadi tidak serta merta ya, tapi memang Rp 601 miliar pagunnya, tertinggi. Jadi bisa berkurang, kalau lebih tidak mungkin, pasti berkurang dari itu pakainya berapa," kata Damayanti, dikonfirmasi terpisah.

Dia juga mengaku, walaupun sudah dianggarkan dalam APBN 2018, pembangunan gedung baru DPR belum tentu dimulai tahun 2018 mendatang. Pasalnya, sejumlah tahapan harus dilalui dalam proses pembangunan itu. "Jadi begini, kalaupun 2018 ada, ini nggak serta langsung membangun gedung, harus ada perencanaan, konsultan perencanaan, konsultasi manajemen konstruksi dulu baru dibangun," kilahnya.

Darmayanti menguraikan, pembangunan gedung baru DPR nantinya berbeda dengan konsep yang pernah diusulkan tahun 2015. Adapun pembangunan gedung baru DPR merupakan salah satu dari tujuh proyek penataan kawasan Parlemen. "Ini kan baru, jadi semuanya masih belum ada," ucapnya. (aen)